

EFEK MEDIA **DALAM LIPUTAN KASUS** **TERORISME**



MUHAMMAD KHAIRIL

**EFEK MEDIA
DALAM LIPUTAN KASUS TERORISME**

Dr. Muhammad Khairil, S.Ag., M.Si

EFEK MEDIA DALAM LIPUTAN KASUS TERORISME

PENULIS

Dr. Muhammad Khairil, S.Ag., M.Si.

EDITOR

Nurliana, S.I.Kom.

SAMPUL

Gemilang Bayu Ragil Saputra, S.I.Kom.,

PENERBIT

Mars Publisher

BTN Teluk **Palu** Permai Blok E2 no.11
Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

ISBN 978-602-1273-12-8

Cetakan I April 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin
tertulis dari penulis dan penerbit.

KUTIPAN PASAL 72:
Ketentuan Pidana Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-
-

KATA PENGANTAR

Fakta bahwa tindak terorisme dan efek dari aksi teror merupakan tragedi bagi manusia dan kemanusiaan. Bagaimanapun dan apapun tujuannya, ketika dilakukan dengan tindakan teror maka akan selamanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan termasuk nilai ideologi dari para pengikutnya. Penanganan tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris memerlukan upaya sistemik, intervensi yang tepat dan holistik sehingga siapapun akan merasakan ketenangan, keamanan dan harmoni sosial dalam tatanan sistem sosial.

Hasil studi tentang **efek media dalam liputan kasus terorisme** ini memuat data dan informasi tentang reaksi dan aksi masyarakat muslim di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia akibat pemberitaan terorisme melalui media massa. Pro kontra mewarnai wacana pemberitaan media massa, berbagai demonstrasi terjadi dimana-mana, egoisme kepentingan dan perang wacana antara berbagai media massa juga memiliki andil dalam mewarnai pemberitaan terorisme.

Hal yang cukup ironis adalah ketika pemberitaan terorisme pada media massa selalu diidentikkan dengan tokoh-tokoh organisasi gerakan Islam dan gerakan-gerakannya, sehingga menyudutkan umat Islam dan membentuk opini publik ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat non muslim dan mereka yang belum paham sepenuhnya hakekat Islam, bahwa Islam adalah teroris dan teroris adalah Islam. Sesungguhnya asumsi tersebut sangat bertentangan dengan konsepsi Islam sebagai agama rahmat bagi sekalian alam.

Berbagai tuduhan, tudingan, fitnah maupun spekulasi yang sering bersifat prematur, yang kadangkala sulit dipertanggungjawabkan kebenaran, keabsahan dan validitasnya baik yang dikembangkan oleh Amerika Serikat maupun yang berkembang di Indonesia mengarah atau identik pada gerakan Islam radikal atau gerakan Islam fundamentalis (Islam garis keras).

Proses peliputan media dalam berbagai kasus terorisme di Indonesia idealnya ditempatkan secara proporsional sebagai kajian kritis kerja profesi wartawan yang menjunjung tinggi profesionalisme. Efek liputan media dalam ranah publik bagaimanapun adalah realitas kedua yang telah dikonstruksi sesuai dengan perspektif dan kepentingan Media. Kasus terorisme hendaknya ditempatkan pada peliputan objektif media yang secara komprehensif dapat melihat multi perspektif sehingga tidak merugikan dan menjatuhkan kelompok tertentu. Media adalah sarana informasi dan pendidikan untuk melakukan kontrol dan kritik sosial.

Semoga hasil studi ini dapat memberikan kontribusi dalam pemetaan tindak terorisme dan juga dapat memberik masukan dalam proses peliputan media yang harusnya secara objektif memberikan kesadaran dalam perimbangan pemberitaan sehingga Islam tidak selalu menjadi objek kajian media dalam kasus peliputan terorisme.

Penulis

Dr. Muhammad Khairil, S.Ag., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x

BAB I PENDAHULUAN: TERORISME DALAM LIPUTAN MEDIA

1.1. <i>Permasalahan Terorisme Dalam Liputan Media.....</i>	1
1.2. <i>Urgensi dan Tujuan Peliputan Terorisme Pada Media</i>	6
1.3. <i>Kerangka Konseptual.</i>	8
1.4. <i>Pendekatan Metodologis.....</i>	17

BAB II PERAN DAN FUNGSI MEDIA MASSA

2.1. <i>Prinsip Dasar Media Massa</i>	23
2.2. <i>Pemberitaan Media Massa</i>	35
a. <i>Pendekatan politik ekonomi (The political-economy approach)</i>	37
b. <i>Pendekatan organisasi (organizational approach).....</i>	38
c. <i>Pendekatan kultural (cultural approach)</i>	38
2.3. <i>Kepentingan Politik Ekonomi Media</i>	43

BAB III ANALISIS EFEK MEDIA DAN TERORISME

3.1. <i>Uses and Gratification Theory</i>	51
3.2. <i>Media dan Agenda Setting.....</i>	53
3.3. <i>Jarum Hipordemik.....</i>	56
3.4. <i>Relasi Media dan Terorisme</i>	59

BAB IV_EFEK PEMBERITAAN TERORISME BAGI ORGANISASI ISLAM

4.1. *Pergerakan Islam di Indonesia... Error! Bookmark not defined.*

4.2. *Islam dan Terorisme..... Error! Bookmark not defined.*

4.2. *Efek Pemberitaan Terorisme Terhadap Organisasi Islam..... Error! Bookmark not defined.*

1. *Sejarah Berdirinya Organisasi Islam di IndoensiaError! Bookmark not defined.*
2. *Efek Pemberitaan Terorisme Terhadap Organisasi IslamError! Bookmark not defined.*

BAB V PENUTUP: RESOLUSI LIPUTAN TERORISME

1. *Kesimpulan..... Error! Bookmark not defined.*

2. *Saran-saran..... Error! Bookmark not defined.*

Daftar Pustaka Error! Bookmark not defined.

INDEX Error! Bookmark not defined.

GLOSARIUM Error! Bookmark not defined.

BIODATA PENULIS Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi isi media.....	39
Gambar 3.1. Model Uses and Gratification Theory	52
Gambar 3.2. Bagan Teori Agenda Setting	55
Gambar 3.3. Bagan Teori Jarum Hipodermik	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kekuatan dan Kelemahan Teori Ekonomi Politik	46
Tabel 2.2. Perbedaan Ekonomi Politik Liberal dan Kritis	49
Tabel 4.1. Frekuensi Membaca Berita	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2. Intensitas Terpaan Media Massa dan Penilaian Khalayak	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3. Bentuk Penyajian berita	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.4. Netralitas Berita	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN:

TERORISME DALAM LIPUTAN MEDIA

1.1. Permasalahan Terorisme Dalam Liputan Media

Tindak terorisme yang menimpa gedung WTC di New York maupun gedung Pentagon di Washington DC atau yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001 yaitu runtuhnya menara kembar *World Trade Center* yang memiliki 110 lantai sebagai simbol yang melekat dari kebanggaan ekonomi Amerika Serikat (AS), serta runtuhnya Pentagon yang menyimbolkan kekuatan Angkatan Militer mereka bagaimanapun telah mengubah pandangan dunia terhadap kekerasan teroristik dan merupakan tragedi kemanusiaan. Peristiwa tersebut dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh pemberitaan media massa secara global sebagai konsekuensi logis dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Efek revolusi teknologi informasi dan komunikasi serasa telah membuat dunia semakin kecil, lantaran berhasil menjadikan seluruh peristiwa di seluruh penjuru dunia menjadi ruang publik (*public space*) yang bisa diakses tanpa dibatasi ruang dan waktu. Arus intensitas informasi yang kian deras telah

menyebarkan keseluruh penjuru dunia tanpa batasan ruang dan waktu. Eksploitasi informasi pemberitaan terorisme pada media massa tidak hanya terkait kepentingan ekonomi politik media namun juga menjadi ajang bagi pertarungan kepentingan ideologi media. Ironis, ketika pemberitaan terorisme pada media massa selalu diidentikkan dengan tokoh-tokoh organisasi gerakan Islam dan gerakan-gerakannya. sehingga menyudutkan umat Islam dan membentuk opini publik ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat non muslim dan mereka yang belum paham sepenuhnya hakekat Islam, bahwa Islam adalah teroris dan teroris adalah Islam. Sesungguhnya asumsi tersebut sangat bertentangan dengan konsepsi Islam sebagai agama rahmat bagi sekalian alam.

Melalui pemanfaatan media massa telah mengakibatkan perang ideologi media berbasis kepentingan ekonomi politik media. Akses informasi yang tanpa batas dengan pemanfaatan teknologi informasi telah membuka ruang yang selebar-lebarnya pada masyarakat internasional untuk menyorot dan melakukan upaya analisis kritis terhadap berbagai kasus terorisme. Salah satu diantaranya adalah analisa yang menilai kritis bahwa Amerika Serikat dalam beberapa hal sudah melampaui batas dalam tindak kasus terorisme khususnya dalam memerangi jaringan terorisme internasional.

Menurut versi AS bahwa terdapat jaringan terorisme Internasional yang dipimpin oleh Osama Bin Laden yang dinamakan Al-Qaeda dan jaringan tersebut telah mempunyai sel-sel di banyak negara, termasuk Indonesia yang juga

terindikasi memiliki jaringan kelompok Al-Qaeda. Atas dasar dugaan dan kecurigaan yang begitu besar terhadap jaringan Al-Qaeda yang berada di Afganistan, maka tanpa toleransi AS memerangi Afganistan hingga sistem pemerintahannya dihancurkan kemudian dibawah kekuasaan Amerika pemerintahan baru Afganistan dibentuk.

Efek pemberitaan terorisme di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia menjadi fenomena baru yang muncul di era reformasi. Sasaran pemboman tidak lagi dipilih-pilih, mulai dari gedung pemerintah, gedung swasta, tempat-tempat umum, hingga rumah ibadah. Korban jiwa berjatuhan tanpa memandang lagi baik anak-anak, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Masyarakat merasa khawatir dan ketakutan terhadap kondisi keamanan dan keselamatan diri mereka.

Peristiwa terorisme melalui aksi pengeboman yang merenggut korban jiwa cukup besar terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di legian Bali sekitar pukul 23.30 WIB, yang mengakibatkan korban 187 orang tewas dan melukai lebih dari 282. Menurut Kadispen Polda Bali, dikutip dari Republika (2002), Kombes Suyanto ledakan bom malam itu terjadi di empat lokasi berbeda, ledakan pertama terjadi di Ranon, kemudian ledakan selanjutnya terjadi di jalan Legian Kuta, di depan Pady's Club. Beberapa detik kemudian, ledakan dahsyat pun terjadi di depan Sari Club, yang mengakibatkan empat bangunan runtuh, 20 rusak berat, 27 mobil dan 7 sepeda motor hancur.

Reaksi dan aksi masyarakat muslim di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia bermunculan akibat pemberitaan terorisme melalui media massa, pro kontra mewarnai wacana pemberitaan media massa, berbagai demonstrasi terjadi dimana-mana, egoisme kepentingan dan perang wacana antara berbagai media massa juga memiliki andil dalam mewarnai pemberitaan terorisme.

Sebenarnya aksi terorisme menjadi pemberitaan di media massa sejak jaman dahulu di mana-mana termasuk juga di Indonesia. Salah satu isu yang diangkat oleh media di tanah air saat reformasi adalah terorisme yang diduga ada keterkaitannya dengan gerakan Islam garis keras dan gerakan fundamentalis Islam yang terkait dengan jaringan global (Wahjuwibowo, 2015: 4).

Hal yang cukup ironis adalah ketika pemberitaan terorisme pada media massa selalu diidentikkan dengan tokoh-tokoh organisasi gerakan Islam dan gerakan-gerakannya, sehingga menyudutkan umat Islam dan membentuk opini publik ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat non muslim dan mereka yang belum paham sepenuhnya hakekat Islam, bahwa Islam adalah teroris dan teroris adalah Islam. Sesungguhnya asumsi tersebut sangat bertentangan dengan konsepsi Islam sebagai agama rahmat bagi sekalian alam.

Berbagai tuduhan, tudingan, fitnah maupun spekulasi yang sering bersifat prematur, yang kadangkala sulit dipertanggungjawabkan kebenaran, keabsahan dan validitasnya baik yang dikembangkan oleh Amerika Serikat maupun yang

berkembang di Indonesia mengarah atau identik pada gerakan Islam radikal atau gerakan Islam fundamentalis (Islam garis keras). Hal tersebut dapat terlihat pada penangkapan sejumlah tokoh pergerakan Islam, seperti Ja'far Umar Thalib, Habib Rizqie, Ust. Abu Bakar Ba'asyir, Ashar Daeng Salam, Muhtar Dg Lau, Agung Hamid dan para aktivis Islam lainnya serta vonis atas berbagai gerakan Islam seperti Jamaah Islamiah dan beberapa gerakan Islam lainnya yang dianggap memiliki jaringan terorisme, merupakan kemas berita yang bernuansa terorisme dan identik dengan gerakan organisasi Islam.

Fenomena pemberitaan media massa tentang terorisme dan keterkaitannya dengan khalayak yang ada dalam gerakan organisasi Islam menarik untuk dilakukan kajian kritis interpretif dengan membangun hipotesis awal bahwa salah satu negara yang memiliki gerakan organisasi Islam terbesar adalah Indonesia dan beberapa peristiwa terorisme keterkaitannya dengan pergerakan Islam, terjadi di berbagai wilayah termasuk wilayah Sulawesi Selatan khususnya Makassar dan Wilayah Sulawesi Tengah termasuk diantaranya adalah Kabupaten Poso sebagai wilayah yang cukup lama mengalami konflik dengan isu SARA.

Atas argumentasi dan urgensi permasalahan yang diungkapkan, maka beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur permasalahan dalam konteks terorisme dan media juga dalam kaitannya dengan beberapa pergerakan organisasi Islam di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi media dalam peliputan Kasus Terorisme.
2. Bagaimana pola pendekatan analisis media terhadap kelompok bersenjata dalam kasus liputan terorisme.
3. Bagaimana efek media dalam kasus pemberitaan terorisme terhadap kelompok dan organisasi Islam.

1.2. Urgensi dan Tujuan Peliputan Terorisme Pada Media

Eksistensi teroris sangat samar dan terorganisir secara rapi dengan jejaring yang sangat rumit dan dinamis. Tidak mudah menelusuri dan memahami jejak dan target-target sasarannya. Beberapa orang yang terindikasi oleh aparat sebagai aktor teror di beberapa tempat di Indonesia, disinyalir terkait dengan aktivitas yang sama di daerah lain, bahkan diduga terkait dengan pihak luar negeri. Beberapa daerah yang telah dijadikan arena oleh teroris seperti Bali, Maluku, dan Poso di Provinsi Sulawesi Tengah telah terbukti mampu menunjukkan eksistensi kelompok teroris.

Dua peristiwa peledakan bom di Sulawesi Tengah yang tergolong dahsyat, telah mengakibatkan lebih dari 100 korban termasuk anak-anak dan wanita. Berdasarkan pemberitaan Kompas tertanggal 29 Mei 2005, bom pertama diledakkan di Pasar Tentena Kabupaten Poso pada Sabtu pagi 28 Mei 2005, memakan korban 21 meninggal dan 53 terluka. Bom kedua di Pasar Daging Maesa Kota Palu pada penutupan tahun 2005 tepatnya 31 Desember 2005 pagi, dikutip dari Jawa Pos tertanggal 1 Januari 2006, memakan korban 7 orang meninggal

di tempat, 50 terluka seirus dan beberapa diantara korban itu kondisinya sangat kritis. Selain itu, masih terjadi penembakan, penculikan dan mutilasi yang menambah deretan jumlah korban orang-orang tak bersalah khususnya bagi masyarakat Poso.

Sesungguhnya fokus kajian dan urgensi dalam konteks penelitian ini adalah pada peliputan dan keterkaitan berbagai kasus terorisme khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Hal ini bisa terukur dan teramati secara menyeluruh ketika dapat ditempatkan dalam konteks sebelum konflik Poso yaitu dengan melihat kehidupan dan penghidupan masyarakat sebelum konflik. Pada pengamatan lanjutan juga akan teranalisis bagaimana peran media dalam melipu dan memberitakan berbagai kasus konflik yang selama ini terjadi. Pada titik puncak akan terurai relasi antara media dan terorisme khususnya ketika pemberitaan hasil liputan tindak terorisme yang selalu terindikasi keterlibatan organisasi islam dan simbol-simbol keagamaan.

Tindak kekerasan terorisme di Propinsi Sulawesi Tengah khususnya wilayah Poso dan wilayah-wilayah sekitarnya terindikasi memiliki jaringan yang lebih luas, bahkan bukan tidak mungkin masuk dalam jejaring global. Beberapa fakta yang mendukung asumsi ini dikemukakan antara lain bahwa *pertama*, tertangkapnya beberapa kali penyelundupan senjata api dan amunisi dalam jumlah besar yang dipasok dari luar. *Kedua*, terdapatnya kelompok/organisasi yang diidentifikasi beraktivitas mirip dengan kelompok/organisasi yang ada di pulau Jawa dan di luar negeri. *Ketiga*, tertangkapnya oknum-oknum yang disinyalir oleh Polri terkait dengan peristiwa bom di Hotel Merriot

dan di Bali. *Keempat*, adanya indikasi hubungan ideologi perjuangan dan hubungan personal antara oknum-oknum teroris Poso dengan gembong terorisme Azhari Husin dan Nurdin M.Top. *Kelima* aksi-aksi teror yang tergelar mempunyai kemiripan dengan evidence terorisme di tempat lain.

Upaya yang harus tetap dan terus dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan terorisme salah satunya melalui program deradikalisasi yaitu segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner seperti hukum, agama, sosial budaya dan komunikasi. Deradikalisasi terorisme diwujudkan melalui program reorientasi, re-edukasi, resosialisasi dan yang paling utama adalah upaya deideologisasi yaitu suatu upaya untuk menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi radikal yang dimiliki oleh kelompok teroris.

1.3. Kerangka Konseptual.

Kata teror berasal dari bahasa latin "*ter'or. less*" yang berarti rasa ketakutan (*fright*) atau rasa sangat takut (*great fear*). *Terrorism* berarti "*policy of getting what one wants in politic by using murder etc.* Dalam kamus *Webster's New School and Office Dictionary* oleh Noah Webster, Fawcett Crest Book, disebutkan bahwa teror berarti *Extreme fear* (ketakutan yang amat sangat), *one who excites extreme fear* (seorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat), *the ability to cause such fear* (kemampuan menimbulkan ketakutan), atau pengertian tersebut dapat juga diartikan sebagai *the systematic*

use of violence, as murder, by a party or faction to maintain power, promote, political, etc (Carver, Wallance, & Cameron, 1974). Terorisme dikenal sebagai bentuk kekerasan yang digolongkan kedalam “kekerasan politik” atau juga disebut “kekerasan sipil”. Kekerasan politik mencakup suatu spektrum yang sangat luas, mulai dari unjuk rasa atau protes dengan menggunakan kekerasan, pemberontakan spontan dan sporadis, pemberontakan berencana dan berlanjut, kudeta, insurjensi, sampai ke revolusi (Nainggolan, 2002:106).

Hasil penelitian dan kajian kritis yang dilakukan oleh Hendropriyono (2009) tentang “*Terorisme Dalam Kajian Filsafat Analitika: Relevansinya dengan Ketahanan Nasional*” dinyatakan bahwa dasar epistemologis sebagai prinsip pembenaran gerakan fundamentalis untuk melawan kekuasaan Barat adalah landasan literal “jihad”. Akibat seruan-seruan bahasa terorisme Osama Bin Laden, kata “jihad” menjadi ikon baru dan *key word* di media massa sehingga secara apriori masyarakat Barat bahkan sebagian masyarakat Indonesia telah tersesat dalam *epistemological mistake* (kekeliruan dalam mencerpap kebenaran sumber pengetahuan) dengan mengidentikkan Islam, jihad dan terorisme.

Hasil penelitian lainnya yang mengkaji dan menganalisa berbagai perspektif dalam kajian terorisme adalah penelitian Muhammad Khairil (2004) tentang “*Pengaruh Pemberitaan Terorisme Pada Media Massa Terhadap Gerakan Organisasi Islam di Kota Makassar*” menunjukkan bahwa media massa telah memberi pengaruh yang besar terhadap organisasi-

organisasi keagamaan yang ada di Kota Makassar khususnya organisasi atau kelompok dengan paham radikal diantaranya adalah Wahdah Islamiah dan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam.

Studi terorisme dalam kancah penelitian ilmu sosial bertolak dari pendekatan kualitatif, yaitu penelitian deskriptif untuk menemukan dan menggambarkan kompleksitas fenomena terorisme dan tingkah laku teroris. Post (1984) dalam penelitiannya tentang psikologi teroris, tidak menemukan gejala utama psikopatologi dari para teroris. Demikian pula halnya penelitian yang dilakukan oleh Crenshaw (2003) tentang karakteristik teroris kelompok terorisme yang bernama *National Liberation Front (NLF)* di Algeria, menyatakan bahwa pada umumnya teroris adalah orang-orang normal dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi (Crenshaw, 2003).

Penelitian tentang terorisme juga dilakukan oleh Heskin (1984) terhadap anggota *Irish Republican Army (IRA)* di Irlandia Utara yang kemudian tidak menemukan indikasi bahwa para teroris memiliki gangguan emosional. Ketiga hasil penelitian yang dikemukakan itu tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa seorang teroris mengalami gejala psikopatologis (Heskin, 1984).

Pada aspek latar belakang sosial teroris, hasil penelitian Clark (1983) terhadap teroris *Euzkadi Ta Askatasuna (ETA)* di Spanyol mengungkapkan, bahwa pada umumnya mereka berasal dari keluarga marginal atau berketurunan campuran yang sering dilecehkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dikatakan bahwa melalui gerakan terorisme, mereka ingin menunjukkan bahwa sebagai orang marginal, mereka mampu melakukan banyak hal, termasuk yang tidak dilakukan oleh warga lain. Secara sosiologis, isu multikultural sering mengakibatkan sentrisme rasial yang rentan pergolakan karena terkait dengan soal ideologi yang dianut oleh satuan-satuan sosial itu.

Hasil penelitian dari berbagai kalangan yang dikumpulkan Reich (2003) menyimpulkan bahwa terorisme yang bernuansa ideologis bukanlah wabah *sui generis* atau keunikan yang tidak diketahui asal-usulnya dan bukan pula produk dari orang-orang yang mentalnya kacau. Apa yang disebut sebagai 'terorisme ideologis' merupakan suatu bentuk perjuangan untuk menghapus dikotomi prinsip yang sangat mendasar bagi sebagian kelompok masyarakat. Proses delegitimasi yang mendasari terbentuknya terorisme ideologis dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu (1) tahap krisis kepercayaan, (2) konflik legitimasi, dan (3) krisis legitimasi. Dikatakan bahwa setiap tahapan menunjukkan identitas psikopolitik kolektif tertentu yang dicapai oleh suatu kelompok yang termotivasi secara ideologis.

Bertolak dari beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan, tampak bahwa secara ideologis, seseorang atau sekelompok orang dapat terpanggil secara psikologis dan terdorong secara sosiologis untuk melakukan pergerakan, mereka itu dapat digolongkan sebagai terorisme ideologis. Partisipasi individu melalui solidaritas kesamaan ideologis berbeda-beda menurut kondisi perseorangan. Ada yang hanya sekadar bersimpati,

sebagai pendukung pasif dan aktif, dan ada pula yang menjadi kader, serta sebagai teroris aktif. Obsesi perjuangan mereka sebagai teroris ideologis adalah untuk mewujudkan sebuah perubahan tatanan, akan tetapi dampak proses perjuangannya khususnya bagi masyarakat luas pada umumnya sangat merugikan.

Di samping berbagai definisi yang telah dikemukakan tersebut, maka media juga mencoba membuat definisi yang berbeda ketika memberitakan tindakan terorisme. Definisi menurut media massa yang dikemukakan oleh Laquer (1987: 115) dapat disebutkan secara garis besar sebagai berikut:

- a. Tindakan dan ancaman kekerasan, baik oleh individu ataupun kelompok, untuk merongrong keamanan politik legal.
- b. Penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dalam situasi dimana sarana-sarana propaganda dan penyampaian pendapat lainnya masih ada (dalam masyarakat demokratis)
- c. Kekerasan bermotif politik yang dilakukan kelompok minoritas tanpa menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kemungkinan jatuhnya korban tak bersalah.
- d. Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan politik dengan cara-cara illegal.

Berbagai uraian yang telah dikemukakan terkait terorisme menunjukkan ada tiga unsur utama dalam memaknai terorisme yaitu *pertama*, penggunaan kekerasan secara sistematik yang dilakukan baik oleh individu, kelompok maupun negara. *Kedua*, memiliki tujuan-tujuan politik dan yang terakhir atau yang ketiga adalah niat menebarkan ketakutan pada masyarakat dalam memaksakan kehendak.

Munculnya kelompok-kelompok radikal dari masyarakat sipil yang menggunakan cara-cara kekerasan atau teror di dalam memperjuangkan tujuan politiknya sering dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan negara. Dominannya negara baik dengan kekerasan atau tidak terhadap masyarakat sipil khususnya yang terkait dengan gerakan-gerakan radikal baik dari kelompok muslim maupun non muslim sering menimbulkan frustrasi dan mendorong mereka mengubah jalan dari cara non kekerasan ke jalan kekerasan untuk memperjuangkan kepentingannya.

Sesungguhnya terorisme atau aksi kekerasan yang dilakukan secara sistematis terjadi karena adanya dua unsur utama yaitu pertama adalah terkait dengan adanya permasalahan/tuntutan yang ingin dicapai dan yang kedua adalah adanya pandangan ideologi atau politik tertentu yang melegitimasi pelaku teror untuk melakukan kekerasan.

Selain itu, Sageman dan Richardo (Karnavian, 2008) mengemukakan bahwa terorisme disebabkan oleh tiga faktor yaitu *pertama*, tuntutan/masalah perorangan. *Kedua*, tuntutan kolektif yang membuat individu-individu secara kolektif memiliki tanggung jawab terhadap komunitasnya. *Ketiga* adalah pandangan ideologi atau politik yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tuntutan-tuntutan tersebut.

Permasalahan aksi-aksi kekerasan di Kabupaten Poso dan wilayah sekitarnya oleh kelompok Islam radikal dapat dijelaskan secara lebih sistematis bahwa dalam konteks masalah perorangan beberapa fakta yang terkait dengan masalah tersebut diantaranya adalah persoalan dendam, trauma psikologis, kesulitan ekonomi, hak keperdataan, keputusan dan kasus-kasus yang belum tersentuh secara maksimal. Berbagai persoalan perorangan tersebut kemudian memicu potensi aksi kekerasan dan tindak terorisme.

Pada sisi tuntutan komunitas atau kelompok, terutama karena warga muslim merasa terzalimi oleh warga non muslim. Kondisi ini menyebabkan munculnya gerakan yang terorganisir dalam bentuk gerakan-gerakan organisasi keagamaan yang cenderung radikal karena basis ideologi doktriner.

Khusus di wilayah Poso, perkembangan ideologi radikal itu amat pesat karena adanya semacam simbiosis mutualisme yang terjadi sejak masa konflik komunal. Bagi warga muslim Poso, kedatangan para "*jihadis*" dari luar disambut dengan hangat karena para *jihadis* datang untuk memperkuat barisan

muslim Poso. Lebih dari itu, warga muslim menerima suntikan semangat baru dengan ideologi radikal yang membolehkan mereka untuk memerangi warga non muslim sebagai bagian dari jihad serta kematian dalam jihad dan jaminannya adalah surga.

Fakta bahwa tindak terorisme ternyata tidak hanya dilakukan oleh kelompok muslim namun juga dilakukan oleh kelompok Kristen yaitu dalam kasus pembunuhan penjual ikan di Wilayah Taripa Kecamatan Pamona Utara. Dalam kasus pembunuhan penjual ikan tersebut terungkap bahwa ada 17 orang pelaku tindak terorisme dari kelompok Kristen yang kemudian di tempatkan di dalam Lapas Luwuk (Data diperoleh dari Lapas Luwuk).

Para terpidana teroris yang ditempatkan di Lapas Luwuk atau para terpidana dari kelompok Kristen sesungguhnya menjadi sisi lain bahwa tindakan teror tidak hanya dilakukan oleh kelompok muslim namun juga dilakukan oleh kelompok Kristen. Sangat disayangkan bahwa pencitraan “terorisme muslim” telah dikonstruksi sebagai bagian dari realitas sosial sehingga terdapat kesan di tengah kehidupan masyarakat bahwa Islam adalah teroris dan teroris adalah Islam.

Perdebatan tentang pelaku dan motif dari terorisme sering membawa kepada identifikasi ideologi atau agama dari pelaku teroris, karena ideologi atau agama merupakan sumber legitimasi dari aksinya. Negara mendapatkan legitimasi kekerasan atau teror karena kedaulatan atau kewenangan konstitusionalnya. Sedangkan kelompok masyarakat biasanya mendapat legitimasi dari ideologi atau agama yang ingin

diperjuangkannya. Isu tentang “terorisme Islam” perlu dilihat dan dipertegas lebih jauh apakah Islam melegitimasi teror atau pelaku terorisme baik negara atau bukan negara yang telah membajak Islam?

Persepsi yang bias tentang terorisme dari beberapa kalangan di dunia Barat dan masyarakat non muslim yang ada di Indonesia telah menempatkan Islam sebagai ancaman. Dampak dari persepsi tersebut tampak lebih kuat semenjak serangan teroris terhadap WTC dan Legian Bali yang disiarkan oleh media massa sehingga banyak negara dan kelompok masyarakat Islam menjadi target dalam perang melawan terorisme.

Dalam kasus tindak terorisme yang dilakukan oleh kelompok muslim khususnya di Wilayah Poso sesungguhnya merupakan implementasi dari nilai ideologi radikal yang diterima oleh kelompok muslim Poso dengan semangat jihad kemudian dikonstruksi dan menjelma dalam perilaku berbagai aksi teror diantaranya dalam kasus ledakan bom, penembakan, mutilasi dan kasus teror lainnya.

Upaya yang harus tetap dan terus dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan terorisme diantaranya adalah kajian partisipatif khususnya melalui pendekatan komunikasi untuk dapat mengetahui secara lebih mendalam proses transformasi nilai ideologi yang selama ini diyakini kebenarannya oleh kelompok teroris.

Selain itu, kajian partisipatif lainnya adalah mengurai dan mengungkap motif serta bentuk teror yang telah dilakukan oleh kelompok teroris sehingga akan memberikan kemudahan dalam upaya penanganan tindak terorisme.

1.4. Pendekatan Metodologis

Kajian ini menggunakan pendekatan survey khalayak yaitu menggunakan data kuantitatif dengan instrumenn utama berupa kuesioner, yang didukung dengan data hasil wawancara. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial sebagai penunjang pengambilan kesimpulan.

Adapun terkait lokasi penelitian dilakukan pada dua lokasi berbeda yaitu liputan media dalam kasus terorisme dan kaitannya dengan organisasi Islam yang ada di Kota Makassar dan Kota Palu juga Kabupaten Poso dalam liputan media terkait kelompok bersenjata, konflik Poso sebagai akar tindak terorisme dan pasca konflik dengan ragam tindak terorisme yang diliput oleh media massa.

Penetapan populasi penelitian didasarkan pada dua bagian yaitu populasi target dan populasi survey (Bulaeng, 2002: 118). Populasi target adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang berhubungan dengan penelitian dan merupakan kelompok ideal yang mewakili semua unsur-unsur target yang menjadi pusat perhatian penelitian. Sedangkan populasi survey adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang menjadi sampel penelitian (Bulaeng, 2000: 126).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dalam penelitian ini ditentukan bahwa populasi target adalah seluruh khalayak yang ada dalam gerakan organisasi Islam. Sedangkan populasi survey adalah khalayak yang aktif dan dalam beberapa kasus terlibat dalam konflik poso yang diliput oleh media massa. Olehnya ditetapkan tiga organisasi sebagai target populasi survey yaitu organisasi muhammadiyah, nahdatul ulama dan wahdah Islamiyah. Berdasarkan penetapan populasi yang ada, maka penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik proporsional random sampling karena keseluruhan anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dapat dipilih menjadi anggota sample.

Untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, maka dalam penarikan sampel digunakan table Morgan yang dikontrol dengan "formula Krejcie dan Morgan" (Bulaeng, 2000: 146). Melalui teknis penetapan sampel tersebut maka ditetapkan jumlah sampel sebanyak 53 orang yang terdiri atas pengurus organisasi Muhammadiyah sebanyak 17 orang, Nahdatul Ulama 12 orang dan Wahdah Islamiyah sebanyak 24 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pertama kuesioner, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan kepada yang akan dijawab oleh responden dalam bentuk tulisan berkaitan dengan pemberitaan terorisme pada media massa dan keterkaitannya dengan pergerakan organisasi Islam. Pertanyaan tersebut diberikan skor atau bobot yaitu $a = 4$, $b = 3$, $c = 2$, dan $d = 1$. Kedua, melakukan wawancara, yaitu mendapatkan informasi tentang pemberitaan terorisme pada

media massa yang merupakan suatu bentuk interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan apabila data hasil kuesioner dianggap belum cukup dan masih dibutuhkan data tambahan untuk menyempurnakan hasil penelitian. Pada teknik selanjutnya yaitu dokumentasi, yaitu penelitian yang ditujukan kepada penguraian dan penjelasan mengenai apa yang telah lalu melalui sumber dokumen baik dari media massa cetak maupun dari pergerakan organisasi yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Adapun variabel bebas (*independent variable*) adalah berkenaan dengan pemberitaan terorisme melalui media massa cetak yang berindikasi pada pergerakan organisasi Islam. Sub-sub variabelnya terdiri dari frekwensi berita (X1), bentuk penyajian berita (X2) dan netralitas berita (X3). Variabel tersebut adalah variabel yang memberi pengaruh dengan mempergunakan simbol X. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu efek berita terorisme terhadap khalayak yang ada dalam pergerakan organisasi Islam yang dapat diukur melalui orientasi kognisi, afeksi dan perilaku khalayak (pengurus) organisasi akibat pemberitaan terorisme. Variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi dan mempergunakan simbol Y.

Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu diolah dengan menggunakan bentuk analisis yang terdiri dari :

1. Teknik analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan temuan di lapangan.
2. Teknik analisa kuantitatif, yaitu analisa yang hanya dilakukan terhadap data responden dengan tujuan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua metode aplikasi peneltian kuantitatif yaitu :
 - a. Statistika deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang banyak dengan angka-angka yang simpel tapi penuh arti.
 - b. Statistika inferensial, yaitu digunakan untuk menguji hipotesis.

Adapun bentuk analisis yang dimaksud adalah :

- 1) Korelasi *product moment* yaitu digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara satu variable dengan variable lainnya. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Korelasi antara variabel X dengan variabel Y

X = Variabel Bebas

Y = Variabel Terikat

- 2) Dengan persamaan regresi linear dan multivariat untuk memprediksi pengaruh yang terjadi diantara variable-variable yang ada atau untuk memprediksi variable X ke variable Y. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$Y = a + bX$$

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Keterangan :

Y = Variabel Kriterion atau khalayak yang ada dalam organisasi Islam

X = Variabel prediktor yaitu pemberitaan terorisme, yang terdiri atas :

X₁ = Frekwensi berita

X₂ = Bentuk penyajian berita

X₃ = Proporsionalitas berita

a = Bilangan Konstan (intercept garis regresi)

b = Koefesien Prediktor (slop garis regresi)

- 3) Uji F, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat signifikansi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$F = \frac{r^2 (N - m - 1)}{m (1 - r^2)}$$

Keterangan :

F = Harga F garis regresi

N = Jumlah Sampel

m = Jumlah Prediktor

R = Koefesien korelasi antara kriterium dengan predictor-prediktor

- 4) Uji t, yaitu digunakan untuk mengetahui koefesien regresi antara variable bebas dengan variabel terikat.

Adapun rumus uji statistik yang digunakan adalah :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

t = t hitung

r = Koefesien korelasi

n = Jumlah sample

BAB II

PERAN DAN FUNGSI MEDIA MASSA

2.1. Prinsip Dasar Media Massa

Bagi McLuhan (Nimmo, 1999: 170) setiap media komunikasi mempunyai gramatika. Gramatika adalah aturan kerja yang erat hubungannya dengan gabungan indera (penglihatan, sentuhan, suara, penciuman, dan sebagainya) yang berkait dengan penggunaan media oleh seseorang. Setiap gramatika media dibiaskan untuk kepentingan indera tertentu. Karena orang-orang menggunakan media tertentu, mereka secara berlebihan mengandalkan indera yang berkaitan dengan media tersebut sehingga media merupakan perpanjangan dari indera manusia, bicara sebagai perpanjangan indera untuk suara, cetakan merupakan perpanjangan dari indera untuk penglihatan dan media elektronik tertentu (misalnya televisi) adalah perpanjangan indera peraba.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh McLuhan, Innis memandang bahwa media komunikasi sebagai perpanjangan tangan dari pikiran manusia dan beranggapan bahwa kecenderungan utama dalam periode sejarah manapun adalah merupakan suatu pengaruh dari media yang berkuasa pada saat

itu. Dengan kata lain, apa yang terjadi dan apa yang tampaknya penting dalam suatu periode sejarah ditentukan oleh media (Littlejohn, 1996: 565). Untuk dapat lebih memahami media massa maka tentunya tidak lepas dari bagaimana proses pemahaman tentang ciri-ciri khusus dari institusi media, yaitu antara lain :

- a. Memproduksi dan mendistribusi pengetahuan dalam wujud informasi, pandangan dan budaya. Upaya tersebut merupakan respon terhadap kebutuhan sosial kolektif dan permintaan individu.
- b. Menyediakan saluran untuk menghubungkan orang tertentu dengan orang lain, dari seseorang ke masyarakat dan institusi masyarakat yang terkait.
- c. Media menyelenggarakan sebagian besar kegiatannya dalam lingkungan publik dan merupakan institusi yang terbuka bagi semua orang untuk berperan serta sebagai penerima (dalam kondisi tertentu sebagai pengirim).partisipasi anggota khalayak dalam institusi pada hakekatnya bersifat suka rela, tanpa adanya keharusan atau kewajiban sosial. Pemakaian media diasosiasikan orang dengan waktu senggang dan santai, bukannya dengan pekerjaan dan tugas.
- d. Institusi media dikaitkan dengan industri dan pasar karena ketergantungannya pada imbalan kerja, teknologi, dan kebutuhan pembiayaan.

- e. Institusi media selalu berkaitan dengan kekuasaan Negara karena adanya kesinambungan pemakaian media, mekanisme hukum, dan pandangan-pandangan Negara yang menentukan perbedaan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya (McQuail, 1987: 40).

Selain ciri-ciri khusus institusi media tersebut, karakteristik media massa menurut Cangara (2003: 135), secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Bersifat melembaga, artinya bahwa pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
- b. Bersifat satu arah yaitu bahwa komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima.
- c. Meluas dan serempak yaitu bahwa dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki akselerasi informasi.
- d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi dan sebagainya.
- e. Bersifat terbuka yaitu bahwa pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.

Kategorisasi lain dikemukakan oleh Muis (2001: 7) Muis dalam membagi sistem media massa yaitu :

- a. Sistem yang tunduk kepada kekuasaan politik dan sistem yang tidak tunduk pada kekuasaan politik, tetapi kebebasannya dibatasi oleh undang-undang yang dilaksanakan oleh pengadilan.
- b. Sistem otoriter, sistem liberter, sistem yang bertanggungjawab sosial dan sistem yang komunis.
- c. Sistem media pembangunan dan sistem partisipan demokratis di negara yang sedang berkembang.

Merujuk pada berbagai uraian tentang ciri-ciri institusi media dan karakteristik secara umum yang dimiliki oleh media massa serta kategorisasi sistem media massa tersebut, maka selanjutnya akan dikemukakan mengenai definisi dari media massa yaitu menurut Bittner yang dikutip dalam Muhtadi (1999: 73) bahwa media massa dapat dipahami sebagai suatu alat transmisi informasi, seperti koran, majalah,, televisi, radio, atau kombinasi bentuk dari bentuk-bentuk media tersebut. Dalam pemahaman lain media massa diartikan sebagai alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis (Cangara, 2003: 135).

Keberadaan media massa sebagai institusi sosial sesungguhnya merupakan media komunikasi massa yang berperan penting untuk memberikan pencerahan bagi kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Konstitusi Negara (UUD 1945), Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers, dan Undang-undang No. 32 tentang penyiaran sebetulnya memberikan kebebasan

bagi media massa secara bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus berperan sebagai control sosial dan perekat sosial. Menurut Ecip (2002: 3) bahwa ada tiga macam media massa yaitu : media cetak meliputi buku, majalah, tabloid dan surat kabar mingguan/harian, media massa dengar (audio) adalah radio, dan media massa pandang dengar (audio visual) adalah televisi dan film.

Adapun bentuk-bentuk media massa yang jangkauan khalayak luas antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Surat kabar atau biasa disebut Koran.

Industri surat kabar merupakan salah satu bentuk media massa yang paling tua di AS. Menurut sejarahnya industri surat kabar telah menjadi sumber informasi sosial politik dan budaya yang sangat penting bagi para pembacanya. Surat kabar menawarkan beberapa hal untuk setiap tipe pembacanya. Berita lokal, nasional dan internasional merupakan kategori utama dari isi surat kabar yang dikonsumsi oleh paling banyak pembacanya (Albarran, 1996: 150). Menurut William (1982: 279) William surat kabar memiliki kekuatan dan kelemahan. Adapun kekuatan media surat kabar adalah antara lain :

1. *Market coverage*, yaitu media ini dapat menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai dengan cakupan pasarnya, baik pada skala lokal, regional maupun skala nasional.
2. *Comparison shopping (catalog value)*, yaitu kepraktisan dibawa ke mana-mana dan juga media ini dapat disimpan (menjadi dokumen) dalam waktu lama.

3. *Positive consumer attitudes*, yaitu pandangan masyarakat secara umum bahwa surat kabar memuat berita-berita aktual yang perlu segera diketahui oleh khalayak pembacanya.
4. *Flexibility*, yaitu media surat kabar dapat memilih segmen khalayak, prioritas-prioritas mana yang diutamakan.

Adapun kelemahan media surat kabar menurut William (Moriarty, Mitchell, & Wells, 2015: 277) adalah:

1. *Short life span*, yaitu daya tarik informasi surat kabar berlangsung singkat. Konsumen biasanya membaca surat kabar dalam tempo yang singkat, umumnya tidak lebih dari 15 menit.
2. *Clutter*, yaitu isi berita yang tidak memiliki manajemen redaksi dan tata berita yang baik biasanya dapat mengacaukan mata dan daya serap pembaca. Konsekuensi dari hal tersebut adalah berita yang diharapkan dapat menarik perhatian pembaca ternyata dibaca sambil lalu tanpa kesan kuat dalam ingatan.
3. *Limited coverage of certain groups*, yaitu berita surat kabar hanya dapat menjangkau kalangan tertentu. Surat kabar relatif tidak dapat menjangkau pembaca di bawah 20 tahun. Segmentasi khalayak pada umumnya pria dan kalangan tertentu yang memiliki kebiasaan membaca. Jika surat kabar beredar di tengah masyarakat yang relatif minat bacanya rendah, maka eksistensi dan signifikansi fungsi sosialnya menjadi sangat rendah.

b. Televisi.

Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar yang bisa bersifat politis, bersifat informatif, hiburan dan pendidikan atau bahkan gabungan dari keempat unsur tersebut. Televisi dapat menciptakan suasana tertentu yaitu para pemirsanya dapat melihat sambil santai tanpa kesengajaan untuk menyaksikannya. Penyampaian isi pesan seolah-olah langsung antara komunikator dan komunikan. Informasi yang disampaikan oleh televisi akan mudah dimengerti karena jelas terdengar secara audio dan terlihat secara visual (Kuswandi, 1993: 8).

Beberapa karakteristik televisi yang sekaligus menjadi kelebihan dari media ini antara lain (Sutisno, 1993: 3):

1. Memiliki jangkauan yang luas dan segera dapat menyentuh rangsang penglihatan dan pendengaran manusia.
2. Dapat menghadirkan objek yang amat kecil/besar, berbahaya atau langka.
3. Menyajikan pengalaman langsung kepada penonton.
4. Dapat dikatakan "Meniadakan" perbedaan jarak dan waktu.
5. Mampu menyajikan unsur warna, gerakan, bunyi, dan proses dengan baik.
6. Dapat mengkoordinasikan pemanfaatan berbagai media lain, seperti film, foto dan gambar dengan baik.
7. Dapat menyimpan berbagai data, informasi, dan serentak menyebarkan dengan cepat ke berbagai tempat yang berjauhan.

8. Mudah ditonton tanpa perlu menggelapkan ruangan.
9. Membangkitkan perasaan intim atau *media personal*.

Selain kelebihan tersebut, media televisi juga mengandung kelemahan, yaitu sebagai berikut (Sutisno, 1993: 3):

1. Merupakan media satu arah, hanya mampu menyampaikan pesan, namun tidak dapat menerima umpan balik secara cepat. Untuk mengatasi kelemahan ini, bisa digunakan media lain sebagai pelengkap. Misalnya, media cetak, telepon, dan kontemporer. Media yang mytakhir ialah suatu sistem yang disebut televisi/video interaktif. Media ini terutama untuk keperluan pengajaran dan pelatihan.
2. Layar pesawat penerima yang sempit tidak memberikan keleluasaan penonton. Hal ini karena hanya 80% gambar objek mampu disajikan, sedangkan 20% adalah *area lost* dan siaran biasanya tak dapat diulang kembali.
3. Bingkai cahaya (*flash*) dan rangsang kedip cahaya (*flicker*) dapat merusak atau mengganggu penglihatan penonton.
4. Kualitas gambar yang dipancarkan lebih rendah dibandingkan dengan visual yang diproyeksikan (film layar lebar)

c. New media

Dennis McQuail mendefinisikan empat kategori utama dari *new media* sebagai berikut (Ibrahim & Akhmad, 2014: 117):

1. Media komunikasi interpersonal, seperti *email*;
2. Media permainan interaktif, seperti *game* komputer;
3. Media pencairian informasi, seperti mesin pencari di Net;
4. Media partisipatoris, seperti ruang *chat* di Net;

Salah satu bentuk dari keberadaan New Media adalah fenomena munculnya *social network* (jejaring sosial). Mengapa disebut jejaring sosial oleh karena ternyata aktivitas social tidak hanya dapat dilakukan di dalam dunia nyata (*real*) tetapi juga dapat dilakukan di dalam dunia maya (*unreal*). Setiap orang dapat menggunakan jejaring social sebagai sarana berkomunikasi, membuat status, berkomentar, berbagi foto dan video layaknya ketika kita berada dalam lingkungan sosial. Hanya saja medianya yang berbeda (Tamburaka, 2013: 78).

Facebook telah menghadapi berbagai kontroversi. Situs ini telah diblokir di beberapa negara termasuk Republik Rakyat Cina, Vietnam, Iran, Uzbekistan, Pakistan Suriah, dan Bangladesh atas alasan yang berbeda-beda. Misalnya karena anti-Islam dan konten diskriminasi agama diizinkan oleh Facebook, situs ini dilarang di berbagai negara di dunia. Selain itu Facebook juga dilarang di beberapa perkantoran untuk mencegah karyawan membuang-buang waktu.

Privasi pengguna Facebook juga dipermasalahkan dan keamanan akun pengguna telah ditembus beberapa kali. Facebook berhasil menyelesaikan tuntutan hukum mengenai klaim kode sumber dan properti intelektual (Tamburaka, 2013: 233).

Severin & Tankard (2011: 3) menjelaskan bahwa Internet, *newsgroups*, *mailinglist*, perbincangan di radio yang mengundang telepon dari pendengarnya, *World Wide Web*, televisi kabel multisaluran, dan buku-buku yang melampirkan disket-disket komputer tidak dapat dikategorikan dengan mudah apakah termasuk dalam komunikasi massa atau bukan.

(Budiargo, 2015: 24) memberi pemahaman bahwa media massa mengikuti pola *one to many*. Dalam model ini, satu sumber mengirimkan pesan ke banyak audiens melalui televisi, radio, majalah, koran, dan sebagainya. Sedangkan *computer mediated communication (CMC)* sering digunakan sebagai bentuk komunikasi *one to many* dan *many to one*. Model *many to one* merupakan gabungan dari komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Karena komputer merupakan tempat menyimpan data dari berbagai sumber yang dapat dibuka oleh individu secara *random* sesuai dengan apa yang diinginkan.

Herring (Thurlow, et. al., 2005: 15) mendefinisikan *CMC* sebagai proses komunikasi yang terjadi antara manusia melalui perantara komputer yang berbeda. Hal ini dimaksudkan bukanlah bagaimana dua mesin atau lebih dapat berinteraksi, namun bagaimana dua orang atau lebih dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya menggunakan alat bantu komputer

melalui program aplikasi pada komputer tersebut. CMC berada pada batasan model komunikasi interpersonal (*one to one*), komunikasi massa (*one to many*), dan komputerisasi (*many to one*). Model lain atau bentuk keempat ialah *many to many*, yaitu setiap orang bisa menjadi *sender* atau *receiver*, setiap orang dapat mengirim atau menerima pesan yang bersifat personal atau massal. Informasi dapat diberikan oleh banyak orang dan diakses oleh banyak orang juga atau disimpan untuk dibuka atau dipilih kembali secara individual (Budiargo, 2015: 25).

Biagy dan Shirly (Budiargo, 2015: 27) mengemukakan bahwa komunikasi massa saat ini bisa dilihat dalam tiga karakteristik, yaitu suatu pesan dikirim dalam bentuk sistem komunikasi massa seperti Internet atau *broadcast*, pesan dikirim dengan sangat cepat, dan pesan dapat mencapai kelompok besar dari berbagai macam orang secara bersamaan dalam waktu yang sama.

Berkaitan dengan interaksi virtual yang membentuk perilaku komunikasi, March Smith (Nasrullah, 2012: 95) memberikan empat aspek penting :

1. *Virtual interactions is aspatial*. Bahwa jarak tidak memengaruhi proses komunikasi interaksi. Kehadiran atau kedekatan jarak tidak menjadi penting selama masing-masing dapat menjalankan fungsinya.

2. *Virtual interaction via system is predominantly asynchronous.* Pengecualian dalam memakai Chat, MUDs, atau ICQs bahwa komunikasi melalui komputer seperti konferensi sistem, dan email dapat dioperasikan berdasarkan waktu atau jadwal yang diinginkan.
3. *CMC is acorporeal because is primarily a text-only medium.* Interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer pada dasarnya diwakili dengan teks. Efek dari *CMC* yang *asynchronous* dan *acorporeal* ini, sebagai misal, mampu melakukan komunikasi dengan melibatkan jumlah individu yang besar, sedangkan hal ini juga bisa dilakukan melalui konferensi telepon.
4. *CMC is astigmatic.* Bahwa interaksi yang terjadi cenderung mengabaikan stigma terhadap individu tertentu, sebab komunikasi berdasarkan teks ini sangat sedikit bisa menampilkan gambaran visual tentang status seseorang dibandingkan apabila bertatap muka.

Holmes (2005: 55) menegaskan bahwa salah satu poin penting dalam komunikasi yang termediasi komputer ini adalah dengan sedikit mengabaikan beragam bentuk interaksi sosial yang mungkin mendukung perspektif CMC, bahwa perspektif ini memfokuskan pada integrasi informasi dimana komunikasi yang terjadi melalui medium komputer berdasarkan pada proses informasi yang dapat dijumpai dalam beragam bentuk.

Menurut Piliang (Bungin, 2014: 178), ruang realitas semu itu dapat digambarkan melalui analogi peta. Bila di dalam suatu ruang nyata, sebuah peta merupakan representasi dari sebuah teritorial, maka di dalam model simulasi, petalah yang mendahului teritorial. Realitas (teritorial) sosial, kebudayaan, atau politik, kini dibangun berdasarkan model (peta) fantasi yang ditawarkan media informasi. Dengan kata lain, individu terlebih dahulu membangun profil atau peta dirinya dalam sebuah interaksi virtual, lalu kemudian realitas yang akan menyesuaikan dengan peta tersebut.

Nasrullah (2016: 83) juga mengemukakan karakteristik utama dari situs jejaring sosial yakni setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan sering bertemu di dunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru (*online*). Membicarakan teks di media siber, ada dua term yang bisa digunakan, yaitu *netspeak* dan *netlingo*. *Netspeak* diartikan pembicaraan yang seolah-olah adalah bahasa tertulis. Sedangkan *netlingo* sebagai penulisan teks yang seolah-olah sedang berbicara.

2.2. Pemberitaan Media Massa

Berita merupakan substansi dari berbagai media massa yang ada. Membuat definisi berita tidaklah semudah memahami berita. Adapun definisi berita dapat dikemukakan antara lain yaitu : pertama, bahwa berita tidak lepas dari kependekan *North, East, West and South (N-E-W-S)*, yang menunjukkan sifat berita

yang menghimpun keterangan dari empat penjuru angin yaitu utara, timur, barat dan selatan. Kedua, menurut Eric C. Heepwood berita didefinisikan sebagai laporan pertama dari kejadian yang penting yang dapat menarik perhatian umum. Ketiga, berita didefinisikan sebagai laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena ia luar biasa, entah karena pentingnya atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-segi *human interest*, seperti humor, emosi dan ketegangan (Dja'far, 1991: 25).

Setiap media massa yang menerapkan pola dan proses kerja jurnalistik menjadikan berita sebagai “ruh” dan produk jual bagi para pembacanya. Nilai beritalah yang menjadi kekuatan utama sebuah media. Berita yang tidak layak jual terlebih yang mengandung hoax pada akhirnya akan tersisih dari persaingan industri media. Disinilah pada akhirnya persaingan antar media itu tercipta dalam menghadirkan berita yang paling menarik, paling aktual, serta mencoba mencari sudut pandang yang berbeda. Dalam pandangan Clarence Hach dan Earl English (Romli, 2009: 3) mengungkapkan bahwa *“News is difficult to define, because it involves many variabel factors”*.

Namun demikian, banyak pakar komunikasi mencoba merumuskan definisi (batasan pengertian) berita, dengan penekanan yang berbeda dengan terhadap unsur yang dikandung sebuah berita. Nothclife (Romli, 2009: 4) misalnya, menekankan pengertian berita pada unsur “keanehan” atau ketidak laziman. Sehingga mampu menarik perhatian dan rasa

ingin tahu. Pemberitaan pada media sendiri merupakan variabel bebas yang dioprasionalisasikan menjadi durasi membaca berita oleh responden yaitu rata-rata waktu yang digunakan untuk membaca pemberitaan surat kabar, bentuk penyajian berita yaitu pemberitaan surat kabar dalam bentuk headline, gambar, dan opini publik.

Ketika media memberitakan suatu peristiwa dengan orientasi tertentu maka aspek yang harus menjadi perhatian adalah dengan melihat pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini ada tiga pendekatan untuk menjelaskan isi media yaitu:

a. Pendekatan politik ekonomi (*The political-economy approach*)

Dalam pendekatan ini dinyatakan bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik diluar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapat media dianggap lebih menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan serta kearah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan. Dalam pendekatan ini, mekanisme produksi berita dilihat sebagai bagian integral dari relasi ekonomi dalam struktur produksi.

b. Pendekatan organisasi (organizational approach)

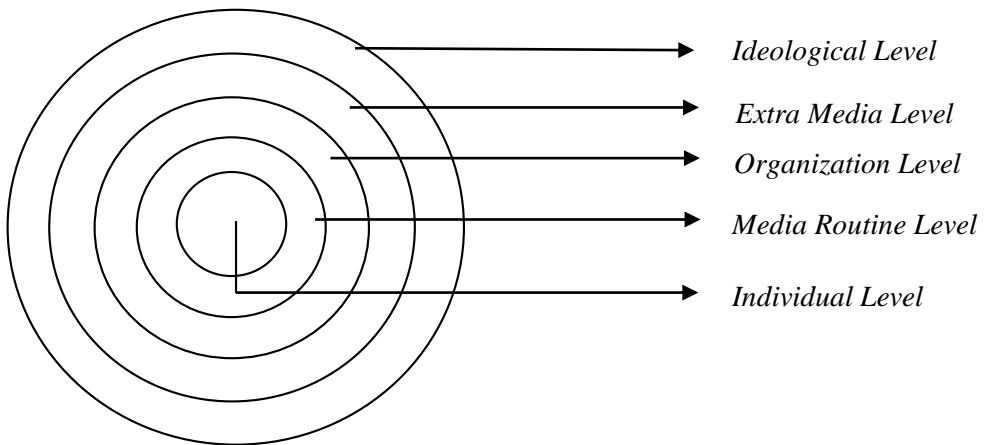
Pendekatan organisasi merupakan pengelolaan media sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukan dan produksi berita. Pendekatan ini melihat berita sebagai hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang redaksi. Praktek kerja, profesionalisme dan tata aturan yang ada dalam ruang organisasi adalah unsur-unsur dinamik yang mempengaruhi pemberitaan. Proses produksi berita merupakan mekanisme keredaksian semata, dimana setiap organisasi berita mempunyai pola dan mekanisme tersendiri untuk memberitakan suatu peristiwa. Mekanisme itu bersifat internal dan tidak ditentukan oleh kekuatan diluar media.

c. Pendekatan kultural (cultural approach)

Dalam pendekatan kulturalis, proses produksi berita dilihat sebagai mekanisme yang rumit yang melibatkan faktor internal media (rutinitas organisasi media) dan faktor eksternal di luar diri media. Mekanisme yang rumit ditunjukan dengan bagaimana perdebatan yang terjadi dalam pemberitaan. Media pada dasarnya memang mempunyai mekanisme untuk menentukan pola atau aturan organisasi. Tetapi pola yang dipakai untuk mekanisme peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan ekonomi politik di luar diri media.

Shoemaker & Reese (1996) menciptakan suatu model hierarki yang menunjukkan faktor-faktor yang membantuk isi media. Model ini memiliki lima jenjang yang masing-masing direpresentasikan oleh lingkaran konsentrik. Lingkaran yang paling dalam menggambarkan *individu* pembuat keputusan. Lingkaran kedua mempresentasikan jenjang *media routines*, lingkaran ketiga mewakili jenjang *organisasi*, jenjang keempat adalah *jenjang ekstra media* dan yang terakhir adalah *jenjang ideologi*.

Tiap jenjang mempengaruhi pembuat keputusan dalam media yang selanjutnya mempengaruhi isi media. Berikut adalah gambaran kelima jenjang tersebut :



Gambar 2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi isi media

Merujuk pada gambar 2.1. terkait faktor-faktor yang mempengaruhi media tersebut, maka dapat diurai bahwa setiap jenjang atau level memiliki pengaruh yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Pada level individu, pengaruh individual dalam

isi media dapat dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang bekerja dalam suatu media. Tidak dapat dipungkiri kalau pengaruh individual berhubungan dengan pengaruh ideologi. Ini disebabkan pekerja yang bekerja di media massa tertentu biasanya memiliki kesamaan ideologi karena memiliki *corporate culture* yang sama. Pengaruh individual ini didapat dari latar belakang pendidikan wartawan, sikap politik, dan orientasi religiusnya.

Pada level kedua yaitu level *media routine* sebenarnya dimaknai sebagai peran yang dikerjakan pekerjanya secara efektif dan efisien. Pekerja media diharapkan untuk mematuhi prosedur tertentu dan membuat keputusan berdasarkan norma dan nilai organisasi tempat mereka bekerja. Ia adalah sebuah pola rutinisasi, yaitu suatu bentuk berulang yang biasa dilakukan oleh pekerja media untuk melakukan pekerjaan mereka.

Rutinitas menghasilkan seperangkat peraturan dan menjadi bagian integral dari profesionalisme media. Rutinitas media dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sistem dan telah distandardisasikan secara institusional dan dimengerti oleh mereka yang menggunakannya.

Pada level ketiga yaitu *organization level* didefinisikan sebagai sebuah kesatuan sosial, formal dan ekonomi yang mempekerjakan pekerja media untuk memproduksi isi media, memiliki tujuan-tujuan tertentu dan terstruktur secara birokrasi. Sedangkan pada *extramedia level*, Pengaruh ekstra media adalah pengaruh yang berasal dari luar organisasi media.

Shoemaker & Reese (1996) mengategorikan adanya lima kategori ekstra media yang mempengaruhi isi media, yaitu :

- 1) Sumber informasi, mereka yang diobservasi atau yang diwawancarai oleh jurnalis, termasuk mereka yang tampil, diikuti atau hanya memberikan *background* cerita. Dapat menstimulir atau menghambat difusi informasi tergantung keinginan mereka.
- 2) Sumber-sumber pendapatan seperti pengiklan dan khalayak. Keduanya memiliki peranan yang besar seperti dikemukakan oleh Altschull (Shoemaker & Reese, 1996: 190) bahwa *the press is the piper and the tune of the piper plays is composed by those who pay the piper*". Selain pendapatan dari khalayak, pendapatan dari iklan menjadi hal yang penting bagi kelangsungan hidup sebuah media. Semakin besar pengiklan maka semakin besar kekuatan yang dimilikinya.
- 3) Institusi sosial seperti kalangan bisnis dan pemerintah. Di negara-negara yang kepemilikan medianya dikuasai oleh swasta, kontrol pemerintah dilakukan melalui hukum, pajak, peraturan dan surat izin. Sedangkan pada negara yang kepemilikan medianya sebagian besar dikuasai oleh pemerintah, kontrol langsung tersebut berbentuk pendanaan media oleh pemerintah.
- 4) Lingkaran ekonomi dan teknologi. Dengan majunya teknologi, media dapat memiliki akses berita dan jangkauan yang lebih luas.
- 5) Pasar, ada tidaknya pesaing lain dalam daerah tersebut.

Pada level puncak, faktor yang mempengaruhi media adalah pada tataran apayang disebut atau yang lebih dikenal dengan istilah *ideological level*. Pada tataran ini, akan sangat terukur dan tampak jelas media mengatur cara kita melihat dunia nyata dan diri kita sendiri, mengontrol apa yang kita lihat sehingga menjadi nyata dan natural.

Ideologi dianggap sebagai suatu set kerangka pemikiran yang dipergunakan untuk melihat dunia nyata dan sebagai pedoman dalam bertindak. Secara fundamental, level ini adalah kepercayaan yang bersumber pada nilai-nilai ekonomi kapitalis, pengejaran keuntungan dan pasar bebas.

Level ini merupakan level yang paling makro dari level-level lain yang ada dalam model hierarki Shoemaker & Reese. *Ideological level* berbeda dengan level-level sebelumnya karena proses produksi isi media pada level sebelumnya dianggap bekerja sesuai dengan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada level ini, Ideologi dianggap merepresentasikan fenomena yang terjadi pada tingkat sosial masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana media mempertahankan batas-batas ideologinya, Daniel Hallin (Shoemaker & Reese, 1996: 227) memperkenalkan tiga lapisan dalam dunia jurnalistik, yaitu pertama, *consensus* (inti dari lapisan) dimana jurnalis mengikuti nilai-nilai yang telah dikonsensuskan.

Kedua, *legitimate controversy* dimana objektivitas dan keseimbangan ditegakkan, dan lapisan terakhir atau ketiga adalah *deviance* dimana jurnalis memiliki ide-ide yang berada diluar ide *main stream* yang ada dalam masyarakat. Institusi media hendaknya menyadari bahwa ketika fakta hendak disampaikan kepada publik, strategi pengemasan berita harus dilakukan dengan berpegang pada etika, juga estetika. Pengemasan berita secara “telanjang” atas dasar semata-mata eksploitatif dapat memberikan efek pada rasa takut dan bahkan kengerian publik. Peran dan prinsip dasar media khususnya apa yang dilakukan oleh jurnalis sebenarnya adalah bagaimana jurnalis melakukan investigasi didasarkan pada fakta dan kebenaran, bukan semata malah melakukan eksploitasi untuk kepentingan komoditas berita dan ekonomi media.

2.3. Kepentingan Politik Ekonomi Media

Ekonomi politik menurut Mas'ood (2001) adalah bidang studi yang menganalisis masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat adanya dua lembaga paralel “neagara” dan “pasar” dan interaksi yang dinamik diantara keduanya dalam dunia modern (Anwar, 2011: 3). Anwar menambahkan bahwa interaksi yang dipelajari oleh ekonomi politik bisa digambarkan dalam berbagai cara. Ekonomi politik memusatkan perhatian pada konflik mendasar antar kepentingan masyarakat dimana individu itu berada.

Dengan kata lain, ekonomi politik adalah studi tentang persoalan yang muncul akibat ketegangan yang terjadi antara pasar, dimana individu terlibat dalam mengejar kepentingan sendiri, dengan negara dimana orang-orang yang sama melakukan tindakan kolektif demi kepentingan masyarakat.

Menurut McQuail (1987: 63) teori ekonomi media merupakan sebuah pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada muatan atau ideologi media. Teori ini fokus ideologi medianya pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Menurut tinjauan ini, institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem politik.

“Political economy is the study of the social relations, particularly the power relations, that mutually constitute the productions, distribution, and consumption of resource, including communication resources” (Vincent, 1996: 2).

Istilah ekonomi politik diartikan secara sempit oleh Mosco sebagai: studi tentang hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi, termasuk didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi (Boyd Barret, 1995: 186). Boyd Barrett secara lebih gamblang mengartikan ekonomi politik sebagai studi tentang kontrol dan pertahanan dalam kehidupan sosial.

Arianto (2011) dalam jurnalnya menggambarkan ekonomi politik sebagai kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan dari kerja lembaga media dan juga dengan keinginan bidang usaha lainnya untuk memperoleh keuntungan, sebagai akibat dari adanya kecenderungan monopolistis dan proses integrasi, secara vertikal maupun horizontal. Ekonomi politik mencakup komodifikasi, spialisasi (spatialization) dan strukturasi (structuration).

Ekonomi politik berkaitan dengan kajian budaya dan kajian kebijakan. Kajian ekonomi politik adalah salah satu pintu masuk untuk mempelajari media komunikasi, dimana dipelajari diantara totalitas masyarakat secara luas. Pendekatan kritis dalam studi ekonomi-politik media dicirikan oleh tiga karakter sentral (Sudibyo, 2004: 7), antara lain:

- a. Pendekatan ekonomi-politik bersifat holistik
- b. Pendekatan ekonomi-politik media bersifat historis
- c. Pendekatan ekonomi-politik media bersifat praksis

Sunarto (2009: 14) mengutip definisi pengertian ekonomi-politik menurut Mosco yang mana bisa dibedakan dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit berarti kajian relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan, bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya. Dalam sumber daya ini termasuk di dalamnya produk-produk komunikasi semacam surat kabar, buku, video, film, dan khalayak.

Dalam pengertian luas berarti kajian mengenai kontrol dan pertahanan kehidupan sosial. Kontrol di sini secara khusus dipahami sebagai pengaturan individu dan anggota kelompok secara internal yang untuk bisa bertahan mereka harus memproduksi apa yang dibutuhkan untuk produksi diri mereka sendiri.

Tabel 2.1. Kekuatan dan Kelemahan Teori Ekonomi Politik

Kekuatan	Kelemahan
Provides focus on how media are structured and controlled	Has a little explanatory at microscopic level
Offers empirical investigation	Is not concerned with scientific verification; is based on subjective analysis of finances
Seek link between media content production and media finances	

Sumber : Baran & Davis (2000)

Halim (2015: 35) membahsakan ekonomi politik media sebagai ideologi yang menjadi pilar utama media televisi menjadi hal yang tak terbantahkan dan akan terus bermetamorfosis (dari segi bentuk ambisi-ambisi) dan hal itu tidak akan pernah menggeser motivasi dasarnya sebagai upaya meraih keuntungan. Ekonomi politik media adalah perspektif tentang kekuasaan pemilik modal dan politik sebagai basis ekonomi dan ideologi industri media dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, yang ditandai kompromi kepada pasar melalui produk-produk budaya komersial.

Menurut Golding dan Murdock, pendekatan ekonomi politik mempunyai tiga karakteristik penting. Pertama, holistik, dalam arti pendekatan ekonomi politik melihat hubungan yang saling berkaitan antara berbagai faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di sekitar media dan berusaha melihat berbagai pengaruh dari beragam faktor ini.

Kedua, historis, dalam artian analisis ekonomi politik mengkaitkan posisi media dengan lingkungan global dan kapitalistik, dimana proses perubahan dan perkembangan konstelasi ekonomi merupakan hal yang terpenting untuk diamati. Ketiga, studi ekonomi politik juga berpegang teguh pada falsafah materialism, dalam arti mengacu pada hal-hal yang nyata dalam realitas kehidupan media.

Pendekatan ekonomi politik media dapat dibagi dalam dua bagian yakni pendekatan ekonomi politik liberal dan pendekatan ekonomi politik kritis (gagasan ini banyak dipengaruhi oleh Marxis dan Neo Marxis). Pendekatan ini secara prinsip terletak

pada bagaimana aspek ekonomi politik media dilihat. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi politik dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktek profesional. Iklan, pemodal dilihat sebagai instrumen profesional dalam menerbitkan media massa. Sebaliknya dalam pendekatan kritis aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknai sebagai kontrol dari pemilik modal atau penguasa. Iklan dan pemodal bukan semata-mata dilihat sebagai bentuk kerja dan praktik profesional.

Tetapi iklan dan pemilik modal itu adalah instrumen pengontrol melalui mana kelompok dominan memaksakan dominasinya kepada kelompok lain yang tidak dominan (yang tidak memiliki modal atau kelas bawah).

Wahjuwibowo (2015: 21) menyebutkan bahwa dalam penyiapan materi konstruksi, media massa kadang memposisikan diri pada tiga hal antara lain, keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Media massa digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapital untuk menjadikan media massa sebagai mesin uang dan pelipatgandaan modal lewat penyajian-penyajian beritanya. Posisi kedua adalah adanya keberpihakan semu kepada masyarakat. Media massa seolah berpihak kepada rakyat dalam bentuk simpati, empati dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, tapi ujung-ujungnya “menjual berita” dan menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis atau pihak pemilik modal.

Struktur ekonomi media dalam pendekatan liberal semata-mata dilihat dalam kerangka kerja profesional. Bagian iklan atau pemilik media adalah salah satu fungsi dari beragam fungsi dalam media. Pendekatan kritis beragamnya posisi dan ketidaksamaan posisi dalam sebuah organisasi media menyebabkan dominasi satu kelompok kepada kelompok lain. Bagian iklan atau pemilik media dapat menjadikan kekuasaannya untuk mendominasi pihak lain, misalnya untuk memaksakan bagian redaksi agar memberitakan kasus-kasus yang menguntungkan pemilik media saja, atau pemilik media yang berafiliasi dengan kekuasaan politik lainnya.

Klasifikasi perbedaan antara dua varian pendekatan ekonomi politik media ini dari aspek epistemologi, historic, issue dan focus serta concern. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perbedaan Ekonomi Politik Liberal dan Kritis

	Ekonomi Politik Liberal	Ekonomi Politik Kritis
<i>Epistemologi</i>	Parsial : Ekonomi sebagai bidang yang terpisah dan khusus	Holistik : faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya saling mempengaruhi

<p>Historis</p>	<p>Analisis historis yang objektif, terlepas dari waktu historis yang khusus dan tempat yang penting</p>	<p>Analisis historis khusus terfokus pada investigasi deskripsi terhadap kapitalisme modern</p>
<p>Isu dan Fokus</p>	<p>Mekanisme dan struktur pasar dimana konsumen dipilih oleh dan dengan komoditi yang bersaing pada basis kegunaan dan kepuasan</p>	<p>Kondisi-kondisi di mana aktivitas komubikasi terstruktur oleh realitas distribusi material dan sumber daya simbolik yang tidak seimbang</p>
<p>Concern</p>	<p>Efisiensi kedaulatan individu dalam arti semakin kuat tekanan pasar, semakin besar kekuasaan konsumen untuk memilih</p>	<p>Keseimbangan antara perusahaan swasta dan intervensi (campur tangan) publik, keadilan, kesetaraan, dan <i>publik goods</i></p>

Sumber : Golding dan Murdock (Sudibyo, 2004: 74)

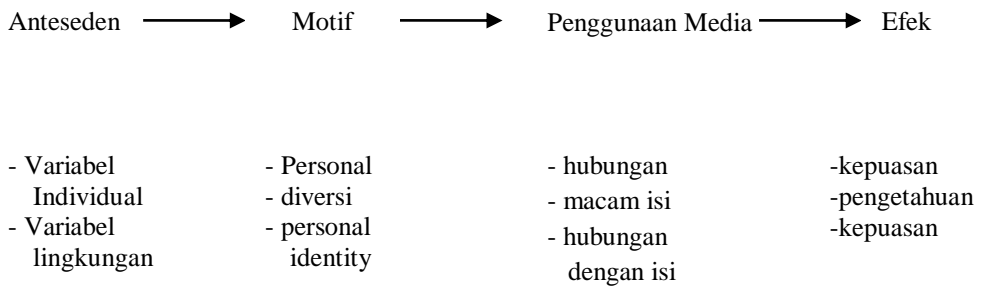
BAB III

ANALISIS EFEK MEDIA DAN TERORISME

3.1. Uses and Gratification Theory

Teori *Uses and gratification* menyatakan bahwa para penonton atau pendengar mampu mendiskriminasi dalam konsumsi media. Teori ini khusus membahas mengenai apa yang dilakukan orang dengan media tertentu (West & Turner, 2008: 79).

Dalam teori ini dikemukakan bahwa khalayak dianggap aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam asumsi ini tersirat pengertian bahwa komunikasi massa berguna, bahwa konsumsi media diarahkan oleh motif, bahwa perilaku media mencerminkan kepentingan dan preferensi, dan bahwa khalayak sebenarnya kepala batu (*stubborn*), karena penggunaan media hanyalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan psikologis, efek media dianggap sebagai situasi ketika kebutuhan itu terpenuhi (Blumler, 1979: 265). Untuk dapat memperjelas mengenai model ini, maka dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Model Uses and Gratification Theory, Sumber: Rakhmat, 2012: 66

Pada gambar model *Uses and Gratification* tersebut, akan berusaha ditemukan hubungan diantara variabel-variabel yang akan diukur. Anteseden meliputi variabel individual yang terdiri dari data demografis, seperti usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor psikologis komunikasi, serta variabel lingkungan seperti organisasi, sistem sosial, dan struktur sosial.

Sedangkan motif, menurut Blumler (1979:209) menyebutkan tiga orientasi yaitu orientasi kognitif (kebutuhan akan informasi/eksplorasi realitas), diversifikasi (kebutuhan akan pelepasan diri tekanan dan kebutuhan akan hiburan), serta identitas personal (menggunakan isi media untuk memperkuat/menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi khalayak sendiri).

Penggunaan media terdiri atas jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media dan berbagai hubungan antara individu konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Efek media dapat dioperasionalkan sebagai evaluasi kemampuan media untuk memberikan kepuasan dan pengetahuan.

3.2. Media dan Agenda Setting

Fungsi *agenda setting* dari media massa adalah kemampuan media massa untuk memilih dan menerangkan pada isu-isu tertentu karena isu-isu itu dipandang penting oleh khalayak (publik). Maxwell E. McComb dan Donald L. Shaw menyatakan "Ide tentang fungsi *agenda setting* dari media massa berhubungan dengan konsep spesifik mengenai hubungan kuat yang positif antara perhatian komunikasi massa dan penonjolan terhadap topik-topik penting itu untuk individu khalayak. Konsep ini dinyatakan dalam istilah kausal: meningkatnya penonjolan topik atau isu dalam media massa (penyebab) yang memengaruhi atau isu yang terdapat di antara para khalayak" (Suprpto, 2009: 49).

Menurut Sukendar (2017: 70) citra terhadap seseorang akan terbentuk oleh peran agenda setting. Teori ini dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikuler, atau tulisan yang akan disiarkannya. Biasanya surat kabar mengatur berita mana yang lebih diprioritaskan. Ini adalah rencana mereka yang dipengaruhi suasana yang sedang hangat berlangsung.

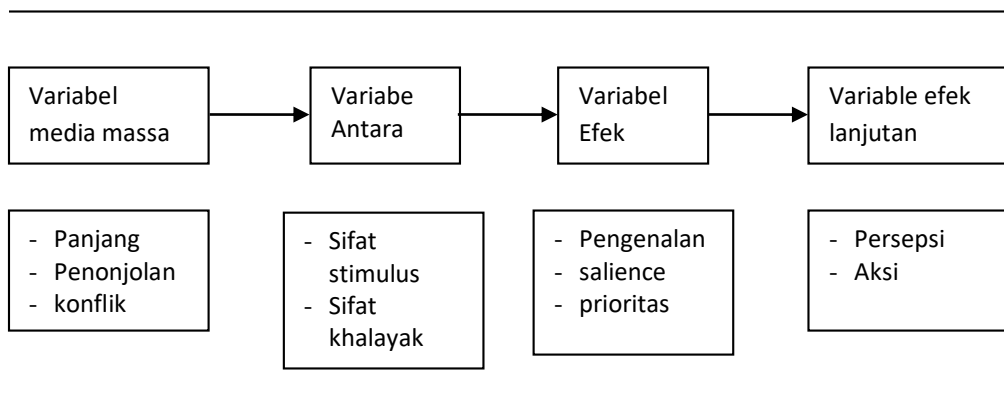
Aforisme paling terkenal dari agenda setting adalah: “ media memang tidak berhasil memberitakan apa yang kita pikirkan, tetapi media berhasil menceritakan tentang hal yang harus kita pikirkan” (Griffin & Ebert, 2006: 401), dengan demikian kita menilai mana yang penting sebagaimana media menilai hal yang penting.

Pengaruh media terhadap politik terletak pada fungsi agenda setting yang terdiri atas tiga bagian sebagai berikut (Simartama, 2014: 129):

- a. Media agenda, yaitu memastikan prioritas atas isu-isu yang muncul di media.
- b. Publik agenda, yaitu agenda media lewat proses tertentu memengaruhi apa yang dipikirkan oleh publik.
- c. Police agenda, yaitu ketika agenda publik tersebut lewat proses tertentu memengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang dipikirkan oleh para pembuat kebijakan sebagai hal yang penting.

Agar fungsi tersebut dapat tercapai, agenda setting melewati dua tingkatan, yaitu: pertama, tingkat pertama menurut McCombs (Simartama, 2014: 129) adalah pengiriman objek yang ditekankan di media ke tempat utama dalam pikiran kita; kedua, pengiriman menonjolkan atribut dominan yang diasosiasikan oleh media dengan objek tertentu ke karakteristik khusus objek tersebut pada pikiran kita.

Teori ini mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan khalayak pada persoalan tersebut. Singkatnya bahwa apa yang dianggap penting oleh media maka akan dianggap penting pula oleh masyarakat dan sebaliknya apa yang dilupakan media maka akan luput juga dari perhatian masyarakat. Teori ini dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut yaitu :



Gambar 3.2. Bagan Teori Agenda Setting .Sumber: Rakhmat, 2005: 69

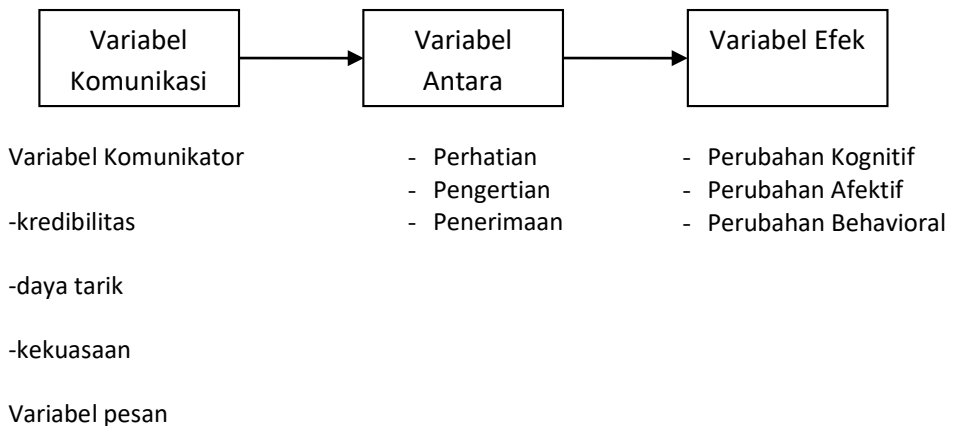
Ketiga teori tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam setiap teori memiliki argumentasi tersendiri dan sudut pandang atau perspektif yang berbeda dalam memaknai pengaruh yang ditimbulkan melalui proses komunikasi massa pada reaksi khalayak.

Teori jarum hipodermik mengasumsikan *powerfull effects* dari komponen-komponen komunikasi. Teori *Uses and Gratification* mengecilkan efek media dan melebih-lebihkan peranan komunikasi di dalam proses komunikasi. *Agenda Setting* menampilkan kembali peranan media komunikasi.

3.3. Jarum Hipodermik

Wiryanto (2004: 81) menjelaskan bahwa model jarum hipodermik pada dasarnya adalah aliran satu tahap (*one step flow*), yaitu dari media massa langsung kepada khalayak sebagai *mass audience*. Model ini mengasumsikan bahwa media massa secara langsung, cepat, dan mempunyai efek yang amat kuat atas *mass audience*. Media massa dengan kapasitas dan efek yang ditimbulkan sepadan dengan teori Stimulus – Response (S-R) yang mekanistik dan sangat populer bagi penelitian psikologis antara tahun 1930 dan 1940. Teori S-R yang mekanistik itu mengajarkan bahwa setiap stimulus (rangsangan) akan menghasilkan gerak refleks. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Morissan (2013: 23) bahwa teori jarum hipodermik atau S-R meyakini bahwa kegiatan mengirimkan pesan sama halnya dengan tindakan menyuntikkan obat yang bisa langsung masuk ke dalam jiwa penerima pesan. Dalam teori ini dikemukakan bahwa komponen-komponen komunikasi (komunikator, pesan, media) amat perkasa dalam mempengaruhi komunikasi.

Disebut jarum hipodermik karena dalam model ini dikesankan seakan-akan komunikasi disuntikan langsung ke dalam jiwa komunikan. Sebagaimana obat disimpan dan disebarkan dalam tubuh sehingga terjadi perubahan dalam sistem fisik, begitu pula pesan-pesan persuasi mengubah sistem psikologis sehingga behaviorisme sangat mempengaruhi teori ini. Berikut ini akan digambarkan teori Hipodermik yaitu :



Gambar 3.3. Bagan Teori Jarum Hipodermik (Rakhmat, 2005: 62)

Variabel komunikator ditunjukkan dengan kredibilitas, daya tarik dan kekuasaan. Kredibilitas terdiri dari dua unsur keahlian dan kejujuran. Keahlian diukur dengan sejauh mana komunikan menganggap komunikator mengetahui jawaban yang benar, sedangkan kejujuran dioprasionalisasikan sebagai persepsi komunikan tentang sejauh mana komunikator bersikap tidak memihak dalam menyampaikan pesannya.

Daya tarik diukur dengan kesamaan, familiaritas dan kesukaan. Kekuasaan dioperasionalkan dengan tanggapan komunikasi tentang kemampuan komunikator untuk memberi ganjaran dan kemampuan untuk meneliti komunikasi tunduk atau tidak.

Variabel pesan terdiri dari struktur pesan, gaya pesan, dan *appeals* pesan. Struktur pesan ditujukan dengan pola penyimpulan (tersirat atau tersurat), pola objektivitas (satu atau dua sisi). Gaya pesan menunjukkan variasi linguistik dalam penyampaian pesan (perulangan, kemudahan dimengerti dan perbendaharaan kata). *Appeals* pesan mengacu pada motif-motif psikologis yang dikandung pesan (rasio-emosional dll).

Variabel media boleh berupa media elektronik, media cetak atau saluran interpersonal (ceramah, diskusi dan sebagainya). Variabel antara ditujukan dengan perhatian yaitu sejauh mana komunikasi menyadari adanya pesan, pengertian diukur dengan sejauh mana komunikasi memahami pesan dan penerimaan dibatasi dengan sejauh mana komunikasi menyetujui gagasan yang dikemukakan oleh komunikator.

Variabel efek diukur pada segi kognisi (perubahan pendapat, penambahan pengetahuan kepercayaan), segi afeksi (sikap, perasaan kesukaan) dan segi *behavioral* (perilaku atau kecenderungan perilaku). Model ini sering juga disebut *bullet theory* (teori peluru) karena komunikasi dianggap pasif menerima berondongan pesan-pesan komunikasi.

Bila menggunakan komunikator yang tepat, pesan yang baik, media yang benar, maka komunikasi dapat diarahkan sekehendak komunikator, sehingga menurut DeFleur menyebutnya sebagai *the mechanistic S – R theory* (DeFleur & Ball-Rokeach, 1975).

3.4. Relasi Media dan Terorisme

Tatkala Timothy Mc Veigh, pelaku peledakan bom di Oklahoma City Amerika Serikat (AS), pada tahun 1995 yang menewaskan 169 orang, ditanya di sidang pengadilan mengapa ia memilih Murrah Federal Building sebagai sasarannya, ia menjawab bahwa bangunan tersebut mempunyai banyak ruang terbuka di sekelilingnya sehingga bagus untuk difoto atau disorot televisi. Jawaban tersebut jelas menunjukkan bahwa Mc Vegh telah memperhitungkan segi liputan media dalam aksi terornya (Pudjomartono, 2003: 4).

Terorisme dan media massa mempunyai hubungan, karena terorisme tanpa publisitas dari media massa maka aksi teror mereka tidak mencapai target maksimal untuk memperoleh perhatian, mendemonstrasikan kemampuannya, merongrong dan merusak citra pemerintahan, atau untuk menarik dukungan terhadap perjuangan sang teroris. Media menjadi alat untuk melakukan upaya relasi yang menghubungkan antara pelaku teror, tindak teroris dan ruang publik untuk selanjutnya secara massif akan terjadi informasi yang dikonsumsi oleh publik sebagai bagian dari kemasan pemberitaan terorisme pada media massa.